

DAMPAK PEMBANGUNAN PLTU DI KAWASAN INDUSTRI TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU

Oleh: Tio Anggara Putra

tioanggaraputra182@yahoo.com

Pembimbing : Zaili Rusli

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

The Environmental Impact is a focus in development to protect the environment in Pekanbaru City. The development of PLTU at Tenayan Raya Industrial Area which uses the environmental impact analysis study still raises problems. Requirements that must be completed in the preparation of the environmental impact analysis are the terms of reference, Andal and RKL-RPL. The purpose of this study was to find out and analyze related The Impact Development of PLTU at Tenayan Raya Industrial Area Pekanbaru City and analyze the factors that influence the Impact Development of PLTU at Tenayan Industrial Area in Pekanbaru City. The theory used in this study is the theory according to Jones about the stages in the policy implementation process that have indicators of the stages of interpretation, organizing stage and application stage. The research method used is a type of qualitative research with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The selection of research informants using purposive sampling technique. The results of this study are that the impact development of PLTU at tenayan raya industrial area in the city of Pekanbaru has not been well implemented. The influencing factors in this study are the supervision of the Environment and Hygiene Agency, the initiator's response and community participation.

Keyword: *The Impact of PLTU, Implementation, Tenayan Raya Industrial Area*

Latar Belakang Masalah

Kota Pekanbaru sebagai ibukota dari Provinsi Riau merupakan Kota yang memiliki perkembangan jumlah penduduk yang pesat, dimana dengan pesatnya perkembangan jumlah penduduk memunculkan begitu banyaknya proses pembangunan yang ada guna menunjang segala fasilitas yang akan diperlukan oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Pembangunan merupakan konsep yang tersusun dan terencana secara sistematis. Pembangunan sepenuhnya untuk menciptakan suatu sistem sosial yang membantu inovasi berkesinambungan tanpa merusak sendi-sendi kehidupan.

Proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sendiri seringkali muncul dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan sekitar pembangunan. Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih secara alami. Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan.

Implementasi dalam proses penyusunan dan penilaian dokumen pembangunan di Kota Pekanbaru yang telah disahkan. Sebagaimana mestinya sebelum proses pembangunan dilakukan, pihak pemrakarsa melakukan konsultasi publik terhadap masyarakat sekitar proyek pembangunan dan menyusun dokumen dampak pembangunan terlebih dahulu

hingga mendapatkan persetujuan dari instansi terkait. Tapi masih ada yang telah menyusun dokumen pembangunan kemudian mendapatkan persetujuan dari instansi maupun masyarakat namun masih tidak mengikuti ketentuan yang ada.

Kenyataannya pada fenomena yang dijumpai masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana mestinya. Berdasarkan berita yang ada, Terjadinya penyerobotan di lahan PLTU Tenayan oleh sekelompok warga yang mengatasnamakan kelompok tani, hal itu menjadi penghalang masuknya investor. Bahkan warga nekat membuat patok-patok pembatas di atas lahan milik pemko, karna mengklaim bahwa memiliki lahan di Kawasan ini.

Seharusnya implementasi dari ketentuan-ketentuan yang tertuang didalam dokumen pembangunan suatu usaha dan/atau kegiatan yang telah disahkan, pihak pemrakarsa melakukan konsultasi publik sebagaimana sesuai pada tahap awal proses penyusunan dokumen pembangunan. Sehingga persoalan seperti berita di atas tidak terjadi. Implementor harus mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dokumen pembangunan yang telah disahkan.

Tapi nyatanya pada saat ini implementasi dari hasil penilaian dokumen pembangunan PLTU masih tidak dijalankan sesuai ketentuan yang ada. Sehingga masih memunculkan Dampak Pembangunan PLTU di Kawasan Industri Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Apabila implementasi dokumen pembangunan ini berjalan dengan baik dapat terhindarnya dampak-dampak negatif yang akan ditimbulkan, dan pihak-pihak yang terkait akan sama-sama diuntungkan.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah di paparkan di latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Dampak Pembangunan PLTU di Kawasan Industri Tenayan Raya Kota Pekanbaru”**.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana Dampak Pembangunan PLTU di Kawasan Industri Tenayan Raya Kota Pekanbaru?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Dampak Pembangunan PLTU di Kawasan Industri Tenayan Raya Kota Pekanbaru?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait Dampak Pembangunan PLTU di Kawasan Industri Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Dampak Pembangunan PLTU di Kawasan Industri Tenayan Raya Kota
- 3. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan diatas diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. **Manfaat Teoritis**
Penelitian ini diharapkan menambahkan wawasan peneliti mengenai pembangunan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar di Kota Pekanbaru pada saat implementasinya serta menganalisis permasalahan yang terjadi dari ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataannya di Kota Pekanbaru.
- b. **Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait untuk pertimbangan dan masukan pemikiran yang bermanfaat mengenai Implementasi dokumen pembangunan yang berdampak besar di Kota Pekanbaru

Konsep Implementasi Kebijakan

Aktivitas implementasi kebijakan menurut Jones dalam Widodo (2018:89) terdapat 3 tahapan dalam proses implementasi kebijakan yaitu :

1. Tahap Interpretasi (*Interpretation*) merupakan aktivitas interpretasi (penjelasan) substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.
2. Tahap Pengorganisasian (*Organization*) merupakan merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*resources*), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*method*) yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan) kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Dalam pengorganisasian lebih mengarah pada proses pengaturan dan penerapan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahap ini yaitu :
 - a. Pelaksana Kebijakan
 - b. Standar Operasional Prosedur
 - c. Sumberdaya
 - d. Penetapan jadwal kegiatan
3. Tahap Aplikasi (*Application*) merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam meneliti tentang “Dampak Pembangunan PLTU di Kawasan Industri Tenayan Raya Kota Pekanbaru” menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Prof. Dr. Sugiyono (2014:9) adalah penelitian yang meneliti kondisi obyek secara alamiah dan menekankan hasil penelitian pada makna dari data yang sebenarnya mengenai Dampak Pembangunan PLTU di Kawasan Industri Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Jalan Parit Indah Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru selaku penegak hukum dari terimplementasinya mengenai dokumen Pembangunan Kawasan Industri Tenayan di Kota Pekanbaru. Dan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru di Jalan Teratai, selaku Pemrakarsa yang menyusun dokumen Dampak Pembangunan Kawasan Industri Tenayan.

Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru
2. Staff Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

3. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru selaku pihak Pemrakarsa yang mengurus Dokumen dampak pembangunan
4. Pegawai PT. PLN Tenayan Raya
5. Lurah Industri Tenayan
6. Masyarakat yang terkena dampak lingkungan.

Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dilakukan, maka data yang diperlukan antara lain:

a. Data Primer

Yaitu data yang didapat dari sumber pertama. Data ini merupakan data mentah yang kelak akan di proses untuk tujuan-tujuan tertentu, sesuai dengan kebutuhan Prof. Dr. Sugiyono (2014:225). Adapun data yang diperoleh secara langsung dari informan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang diteliti yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang meliputi wawancara dari Kepala Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan staffnya, Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru selaku pihak Pemrakarsa yang mengurus Dokumen dampak pembangunan, Pegawai PT. PLN selaku pelaksana kegiatan PLTU tenayan raya, lurah industri tenayan dan masyarakat yang terkena dampak pembangunan, serta pengamatan yang penulis lakukan secara langsung dilapangan. Dimana hal ini untuk lebih mendapatkan hasil yang lebih relevan lagi demi

kelengkapan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari instansi pemerintah Kota Pekanbaru yang meliputi visi dan misi Kota Pekanbaru, letak, luas, batas wilayah Kota Pekanbaru, kondisi sosial budaya masyarakat Kota Pekanbaru dan dari kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang meliputi :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
3. Dokumen Dampak Pembangunan PLTU Tenayan Raya
4. Berita Online
5. Buku Bacaan yang berkaitan dengan penelitian

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014;224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan yang utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan diantaranya :

a. Wawancara

Wawancara merupakan penelitian mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang terpilih untuk memperoleh informasi yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan peneliti mulai dari Awal

Oktober. Dimulai dari wawancara kepada Kepala Seksi tanggal 1 Oktober 2018 dan 13 Januari 2019, wawancara kepada Staff nya tanggal 3 Oktober 2018, wawancara dengan kepala bidang perindustrian tanggal 17 Januari 2019, dengan lurah industri tenayan tanggal 21 Januari 2019 dan ke masyarakat dilakukan dari 22 Januari 2019 hingga hingga pertengahan Februari, wawancara dengan pegawai PLTU dilakukan tanggal 2 Mei 2019. Dalam melengkapi data penulis melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak tersebut yang terlibat dalam Implementasi dokumen pembangunan PLTU di Kawasan Industri Tenayan di Kota Pekanbaru guna mencari data-data yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk memperoleh data yang valid dan akurat.

b. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, mengenai Dampak Pembangunan PLTU di Kawasan Industri Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Pengamatan di lapangan yang penulis lakukan bertujuan untuk mengenali kemungkinan adanya informasi yang dilewatkan dari pedoman wawancara yang dilakukan serta penulis berupaya memperkaya dimensi pengamatan dari fenomena yang ada. Pengamatan (observasi) ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, di sekitaran PLTU tenayan raya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dan menghimpun dokumen-dokumen baik dokumen

tertulis, gambar maupun media elektronik. Dalam metode ini sangat membantu penulis memperkuat penelitian penulis. Dokumentasi berupa foto-foto mengenai permasalahan tentang Dampak Pembangunan PLTU di Kawasan Industri Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Analisis Data

Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan teknis analisis data secara studi kasus kualitatif, yaitu pengelolaan atau informasi yang diperoleh di lapangan berdasarkan hasil wawancara dan pegamatan, semua hasil data tersebut di kumpulkan dan dipelajari sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Kemudian untuk keabsahan hasil penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi data sebagai kegiatan *check, re-chec* dan *crosscheck* antara materi atau data dengan observasi peneliti di lapangan yang selanjutnya hasil observasi ini dilakukan *crosscheck* melalui persepsi penelitian.

Penulis memakai analisis data dilapangan yaitu analisis model Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip dalam (Sugiyono,2014:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam meningkatkan standar perekonomian daerah, memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama demi terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat kota pekanbaru maka dilakukannya pembangunan PLTU di

Kawasan Industri Tenayan Raya yang telah dianalisis mengenai dampak lingkungannya. Pembangunan PLTU di Kawasan Industri Tenayan Raya yang memiliki luas lahan \pm 40 Ha. Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU RIAU 2 x 110 MW meliputi : a. Pembangunan *Coal Yard* (tempat penyimpanan batu bara), b. Pembangunan *Main Building* (bangunan turbin dan generator, *boiler, control room, electro precipitator* dan *chimney*), c. Peruntukan BOP, d. Pembangunan *Switch Yard* (gardu induk local), e. Peruntukan *Ash Yard*, f. Peruntukan *Green belt*, bangunan masjid, area paker, bengkel dll, kebutuhan air pendingin, kebutuhan batu bara, jalan areal lokasi PLTU, pembangunan *jetty* pembangunan sistem air pendingin, pembangunan *pump house*, pembangunan tangka bahan bakar. Tidak dipungkiri bahwa proses pembangunan PLTU di Kawasan Industri Tenayan Raya masih menimbulkan permasalahan di masyarakat. Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan konflik bilamana tidak dikelola dengan baik menurut ketentuan yang berlaku oleh pemerintahan daerah, dinas/lembaga berwenang.

Adapun beberapa fenomena yang dijumpai di lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kurang efektifnya proses konsultasi publik terhadap pembangunan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar
2. Respon terhadap dampak pembangunan yang berjalan kurang efektif.
3. Belum tegasnya implementasi terhadap dokumen pembangunan yang berdampak besar.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Dampak Pembangunan PLTU Kawasan Industri Tenayan Raya Kota Pekanbaru tersebut penulis meneliti dengan menggunakan teori Jones dalam Widodo (2018:89) yang menjadi indikator-indikator sebagai berikut :

1. Tahap Interpretasi

Aktivitas interpretasi kebijakan tadi tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat (*stakeholder*) dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan tadi. Kebijakan ini perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan agar mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi. Tidak saja mereka menjadi tau dan paham tentang apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran kebijakan, tetapi yang lebih penting mereka akan dapat menerima, mendukung, dan bahkan mengamalkan pelaksanaan kebijakan tadi.

Aktivitas interpretasi kebijakan dalam implementasi mengenai dampak pembangunan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan untuk menjalankan kebijakan sebaik-baiknya

Mengimplementasikan mengenai dokumen dampak pembangunan telah dipaparkan di dalam PP maupun Permen terkait hal-hal yang perlu dilakukan untuk pengurusan dokumen mengenai dampak pembangunan. Sebagaimana mestinya didalam PP No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan yaitu : Pasal 3 ayat 1 yang berisi “setiap usaha dan/atau kegiatan

yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen pembangunan berdampak besar”. Kemudian pada pasal 4 ayat 1 yaitu “dokumen pembangunan disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan”. Selanjutnya pada pasal 5 ayat 1 yaitu “Penyusunan dokumen pembangunan dituangkan ke dalam dokumen mengenai dampak pembangunan yang terdiri atas : a. Kerangka acuan, b. Andal, dan c. RKL-RPL. Dalam Permen LH 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki mengenai dampak pembangunan, sebagaimana yang telah terlampir didalam lampiran Permen tersebut terkait rencana kegiatan yang akan dibangun oleh pemrakarsa. Sehingga dari paparan PP maupun Permen telah menjadi acuan ketetapan kebijakan yang harus diimplementasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengenai dampak pembangunan. Kemudian terkait implementasi dari Dampak Pembangunan PLTU Kawasan Industri Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang merupakan rencana kegiatan dinas perdagangan dan perindustrian yang dikelola oleh PT. PLN telah menyiapkan segala berkas yang ditetapkan didalam PP maupun Permen.

2. Tahap Pengorganisasian

Tahap Pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (pelaksana lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya); penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, darimana sumbernya, bagaimana menggunakan, dan

mempertanggung jawabkan); penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja (juklak dan juknis); dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

Terdapat sub indikator yang menjadi poin penting dalam pengorganisasian yaitu :

a. Pelaksana kebijakan

Pelaksana kebijakan dalam hal ini ialah PT.PLN kemudian pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai pengawas dalam merespon segala bentuk kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan.

b. Standar Operating Procedure (SOP)

Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan SOP sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, SOP dapat pula digunakan untuk mencegah timbulnya perbedaan dalam bersikap dan bertindak ketika dihadapkan pada permasalahan pada saat mereka melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat, perlu dibuat prosedur tetap atau prosedur baku berupa standar operating procedure atau standar pelayanan minimal (SPM). standar operating procedure kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terhadap dokumen mengenai dampak pembangunan yang dilakukan sesuai dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yaitu terkelola

dan terjaganya pembangunan yang berwawasan lingkungan.

c. Sumber Daya

Setelah ditetapkan siapa yang menjadi pelaku kebijakan dan SOP, langkah berikutnya perlu ditetapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan tentunya sangat tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Demikian pula yang diperlukan sangat bervariasi dan tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan Pihak Pemrakarsa memahami dan mengerti tentang dokumen mengenai dampak pembangunan karena mereka selalu mengadakan agenda rutin setiap tahunnya yaitu seminar tentang dokumen mengenai dampak pembangunan guna meningkatkan pemahaman mereka selaku implementor dalam merealisasikan pembangunan berwawasan lingkungan.

d. Penetapan Jadwal Kegiatan

Agar kinerja pelaksanaan kebijakan menjadi baik setidaknya dari “dimensi proses pelaksanaan kebijakan”, maka perlu ada penetapan jadwal pelaksanaan kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan tadi harus diikuti dan dipatuhi secara konsisten oleh para pelaku kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan ini penting, tidak saja dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan tetapi sekaligus dapat dijadikan sebagai standar untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan, terutama dilihat dari dimensi proses pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan kebijakan perlu

ditegaskan dan disusun jadwal pelaksanaan kebijakan.

Penetapan jadwal kegiatan implementasi mengenai dampak pembangunan PLTU di kawasan industri tenayan dalam proses penyusunan telah dipaparkan sebagaimana yang ada pada SOP. jadwal kegiatan mengenai proses penyusunan dokumen pembangunan telah didaparkan didalam SOP yang berlaku. Mulai dari tahap sosialisasi, penyusunan dan penilaian dokumen kerangka acuan, andal, RKL-RPL telah dipaparkan jadwal nya sebagaimana mestinya.

3. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan kedalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dan pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahap yang telah disebutkan sebelumnya. Terjalankan suatu rencana yang telah dipaparkan didalam sebuah kebijakan maupun keputusan yang telah diberlakukan dibutuhkannya suatu proses pengaplikasian secara nyata. Jika kebijakan ataupun keputusan yang diberlakukan hanyalah sebatas rencana tapi tidak teralisasi dengan nyata itu menjadi hal dari kegagalan kebijakan itu sendiri. dinas lingkungan hidup terhadap dokumen mengenai dampak pembangunan melakukan sesuai tupoksi nya saja dalam melakukan penilaian dan pengawasan terhadap dokumen mengenai dampak pembangunan yang sudah menerima izin lingkungannya. Segala dampak yang terjadi itu kembali lagi tanggung jawab pihak pemrakarsa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Dampak Pembangunan PLTU di Kawasan Industri Tenayan Raya Kota Pekanbaru

1. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan standar dan sasaran kebijakan dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dalam implementasi dokumen mengenai dampak pembangunan, dibutuhkan juga pengawasan kepada pelaksana lapangan atau pemrakarsa yakni PT.PLN agar kinerja mereka dapat mendukung dari pencapaian hasil dari kebijakan tersebut, ini merupakan peran dari Dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru melalui Bidang lingkungan untuk melakukan pengawasan kepada pemrakarsa.

2. Respon Pemrakarsa

Respon yaitu sifat menanggapi , tergugah hati, memberi tanggapan (tidak masa bodoh) terhadap apa yang harus dilakukan berkaitan dengan keharusan untuk melaksanakan tanggung jawab secara bersungguh-sungguh. Dalam implementasi mengenai dampak pembangunan PLTU di kawasan industri tenayan, pihak pemrakarsa yakni PT.PLN haruslah melakukan segala tanggungjawab yang harus dilakukannya dalam memenuhi segala ketentuan yang ada pada analisis mengenai dampak lingkungan. Respon pemrakarsa merupakan pengaruh yang penting terhadap kelancaran dan keberhasilan dari implemmentasi

dokumen mengenai dampak pembangunan PLTU di kawasan industri tenayan.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif dan solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang ada.

Untuk terlakukannya implementasi mengenai dampak pembangunan PLTU di kawasan industri tenayan sangat diperlukannya partisipasi dari masyarakat, karna segala bentuk proses pembangunan yang ada akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat harus berpartisipasi agar mengerti dan mengetahui konsekuensi apa yang akan mereka terima dan solusi maupun jalan keluar bagaimana yang harus dilakukan agar meminimalisir dari segala dampak yang ada.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis tentang Dampak Pembangunan PLTU di Kawasan Industri Tenayan Raya Kota Pekanbaru maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang mempunyai peran penting sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi mengenai dampak pembangunan PLTU di kawasan industri tenayan raya yang memiliki dampak penting/besar dilihat dari perencanaan dan pengorganisasian sudah

dilakukan dengan baik, akan tetapi jika dilihat dari pelaksanaan dan pengawasan dalam implementasi mengenai dampak pembangunan PLTU di kawasan industri tenayan raya belum dilakukan secara maksimal, pelaksanaan yang dilakukan masih menyerahkan seutuhnya kepada pihak pemrakarsa dan dalam segi pengawasan juga masih ditemukan persoalan-persoalan yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan, seperti masyarakat yang masih masih ada belum tau tentang pembangunan, masyarakat yang masih resah dengan proses pembangunan dan juga penanganan dari dampak yang terjadi terkesan lambat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dampak pembangunan PLTU di kawasan industri tenayan raya Kota Pekanbaru yaitu dinas telah memiliki sumber daya yang memiliki skill dalam penilaian dokumen mengenai dampak pembangunan tapi dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan masih kurang maksimal. Pihak pemrakarsa selaku pihak yang melakukan proses pembangunan PLTU di kawasan industri tenayan raya masih belum memberikan respon yang sigap terhadap kondisi lapangan yang terkena dampak pembangunan. Kemudian partisipasi masyarakat yang masih lemah, dan akan muncul ketika kepentingannya merasa terganggu saja.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang didapat, maka saran penulis dalam Dampak Pembangunan PLTU di Kawasan Industri Tenayan Raya Kota Pekanbaru yaitu:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru harus lebih meningkatkan lagi terhadap pelaksanaan dan pengawasan terhadap implementasi mengenai dampak pembangunan PLTU di kawasan industri tenayan raya, jika pelaksanaan kegiatan dan pengawasan dilakukan dengan baik maka implementasi dari dokumen mengenai dampak pembangunan ini akan berjalan dengan baik sehingga pihak-pihak terkait akan saling mengerti dan sama-sama diuntungkan.
2. Adapun saran terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dampak pembangunan PLTU di kawasan industri tenayan raya kota pekanbaru adalah sebagai berikut :
 - a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan diharapkan melakukan pengawasan yang lebih intens agar pihak pemrakarsa dalam melakukan kegiatan tetap menajalankan segala aturan maupun ketentuan yang telah ditetapkan sehingga implementasi dari dokumen mengenai dampak pembangunan berjalan dengan baik.
 - b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru diharapkan agar melakukan sosialisasi tentang dokumen mengenai dampak pembangunan sehingga tidak hanya pemrakarsa yang mengerti tentang dokumen mengenai dampak pembangunan tetapi masyarakat juga mengerti dan

memahami tentang dokumen mengenai dampak pembangunan.

- c. Dengan adanya implementasi yang baik diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memberikan teguran maupun sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan pemrakarsa.
- d. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan diharapkan membuat himbauan tentang dampak pembangunan PLTU di kawasan industri tenayan yaitu berupa spanduk yang berisi tentang mekanisme pembangunan, dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan sekitar dan keuntungan yang akan didapatkan masyarakat sehingga memunculkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan PLTU di kawasan industri tenayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI.
- _____. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik (Berbasis Dynamic Policy Analysis)*. Yogyakarta : Gava Media.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

- _____. 2009. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Soetari, Endang. 2014. *Kebijakan Publik (Pengantar)*. Bandung : Pustaka Setia.
- Suaedi, Falih. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharno. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik : Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Jakarta : Ombak.
- Suharto, Edi. 2015. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung : Alfabeta.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Praktik*. Pekanbaru : Alaf Riau.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2003. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- _____. 2005. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Wibowo, Eddi dkk. 2004. *Hukum dan kebijakan publik*. Yogyakarta : Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.
- Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Media Nusa Creative
- Wicaksono, Kristian Widya. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- _____. 2005. *Kebijakan Publik Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- _____. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta : CAPS
- Dokumen :**
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- Website :**
<http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/09/16/penyerobotan-lahan-kit-oleh-warga-halangi-masuknya-investor?page=2>